

Policy Brief Penanganan Stunting di Kota Surabaya: Perspektif Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat

Mukodi, Mukodi¹⁾, Deti Rahmawati²⁾

¹STKIP PGRI Pacitan, ²Institute Teknologi Sepuluh Noverber
e-mail: mukodi@stkippacitan.ac.id; deti@its.ac.id²

Received: 28 Mei 2023

Accepted: 15 Juni 2023

Final proof: 30 Juni 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penanganan 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) di Kota Surabaya; (2) mendeskripsikan dan menganalisis penanganan Stunting di bidang pendidikan dan bidang kesehatan; (3) mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat kebijakan penanganan stunting di Kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Obyek penelitiannya di Kampung KB Putat Jaya dan Kampung KB Kali Rungkut. Metode pengumpulan penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan alur analisis versi Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penanganan 1000 HPK Kota Surabaya sudah tepat, optimal dan sesuai dengan perencanaan. Indikatornya, penanganan didasarkan pada bentuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif sesuai sasaran balita yang mengalami stunting, yakni di Kampung KB Putat Jaya dan Kampung KB Kali Rungkut. Di sisi yang sama, penanganan di lakukan secara sistemik berorientasi pada bidang pendidikan berupa sosialisasi dan edukasi penanganan stunting bagi keluarga terimbas. Kemudian, dilakukan pula pada bidang kesehatan, berupa penyuluhan, dan beragam bantuan untuk memotong mata rantai stunting. Penurunan angka agregat stunting di Kelurahan Putat Jaya sebanyak 223% dan Kelurahan Kali Rungkut sebanyak 276% pada 2022 hingga 2023 merupakan wujud keseriusan Kota Surabaya dalam menekan dan mengatasi kasus stunting melalui berbagai program kebijakan. Penanganan stunting di Kota Surabaya dalam perspektif pendidikan dilakukan dengan cara edukasi dan sosialisasi bagaimana cara pencegahan serta penanganan tindakan pada kasus balita stunting di lokus sasaran yang ditetapkan. Kemudian, penanganan stunting dalam perspektif kesehatan melalui penyuluhan dan fasilitasi kesehatan bagi balita dan orang tua penderita stunting di lokusnya.

Kata Kunci: intervensi Stunting, edukasi dan penyuluhan

Abstract

This study aims to: (1) describe and analyze the policy of handling 1000 First Day of Life (Hari Pertama Kehidupan/HPK) in Surabaya; (2) describe and analyze the handling of stunting in the education and health sectors; (3) describe and analyze the supporting and inhibiting factors for the stunting management policy in the city of Surabaya. This research type is qualitative descriptive. The object of the research was Kampung KB Putat Jaya and Kampung KB Kali Rungkut. This research was collected through

observation, in-depth interviews, and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman version of the analysis flow; data reduction, data presentation, and conclusion. The handling of 1000 HPK in Surabaya was proper and appropriate. Treatment indicators are based on the specific intervention and sensitive intervention forms according to the target of toddlers who experience stunting; in Kampung KB Putat Jaya and Kampung KB Kali Rungkut. At the same time, the treatment is carried out systemically, oriented towards education in the form of socialization and education on stunting management for affected families. Then this was also carried out in the health sector through counseling and assistance to cut the stunting chain. The reduction of the aggregate stunting rate in Kelurahan Putat Jaya by 223% and Kelurahan Kali Rungkut by 276% from 2022 to 2023 is a manifestation of Surabaya's seriousness in suppressing and overcoming stunting cases through various policy programs. From an educational perspective, the handling of stunting in Surabaya is carried out using education and outreach on how to prevent and handle actions in cases of stunting under five at a set target locus. Then, handling stunting from a health perspective through counseling and health facilitation for toddlers and parents with stunting at their locus.

Keyword: *stunting intervention, education, counseling*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu masalah yang seringkali terjadi pada anak dan balita. Kondisi gizi buruk terjadi karena kurangnya asupan gizi dan nutrisi baik yang diberikan oleh orang tua pasca dan sesudah melahirkan. Serta kurangnya kesadaran tentang pentingnya menjaga kestabilan pola asupan gizi dan rendahnya tingkat perawatan kesehatan yang baik dan benar (Mukodi, 2022). Stunting dapat diidentifikasi dengan cara membandingkan tinggi seorang anak dengan standar tinggi anak pada populasi yang normal sesuai dengan usia dan jenis kelamin yang sama. Anak dikatakan pendek (Stunting) jika tingginya berada dibawah -2 SD dari standar WHO (Dewey & Begum, 2011).

Persoalan Stunting di Jawa Timur pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya, diakibatkan banyak faktor, diantaranya; (1) asupan gizi yang kurang memadai; (2) kurangnya akses terhadap makanan; (3) pendidikan keluarga yang masih rendah; (4) faktor politik dan ideologi yang tidak berpihak ; (5) minimnya sumber daya potensial dalam penanganan; (6) minimnya kelengkapan cakupan imunisasi; (7) rendahnya cakupan ASI Eksklusif; (8) pelayanan kesehatan yang tidak memadai; (9) lingkungan yang tidak sehat (Mukodi, 2023). Beberapa faktor tersebut, tentunya menjadi memicu tingginya angka prevalensi Stunting di Jawa Timur.

Hasil Survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang telah diterbitkan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Prevalensi Stunting Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 4,3% dari 23,5% di tahun 2021 menjadi 19,2% pada tahun 2022. Capaian penurunan angka Stunting ini di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 21,6 %. Survei ini menempatkan Kota Surabaya menjadi kota dengan jumlah kasus stunting terendah di Jawa Timur (Deti Rahmawati, Eddy Setiadi Soedjono, Soedarso, Nastasia Festy Margini, 2022).

Kasus stunting di Kota Surabaya terus mengalami penurunan, hal ini ditunjukkan dengan jumlah kasus stunting ada 2021 sebesar 28,1 dan mengalami penurunan pada 2022 sebesar 24,1 %. Namun, capaian penurunan prevalensi balita stunting tersebut belum merata untuk wilayah Kota Surabaya. Oleh karena itu, pendekatan untuk memecahkan masalah stunting ini perlu dilakukan secara Holistik dan multisektoral. Upaya penurunan angka stunting diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk masyarakat, media, dunia usaha, akademisi, dan pemerintah daerah. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2001 mengatur tentang konvergensi dan kolaborasi penurunan stunting.

Kolaborasi dapat berjalan dengan baik dibutuhkan pemahaman, sikap, penerimaan, dan persepsi yang selaras antara seluruh elemen pentahelix terkait (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berbentuk deskripsi informatif tentang penanganan stunting di Kota Surabaya. Obyek penelitian ini adalah dua Kampung KB terpilih, yakni: Kampung KB Putat Jaya dan Kampung KB Kali Rungkut. Dua obyek ini ditetapkan dengan alasan, kedua obyek tersebut merupakan Kampung KB yang tingkat penurunan stuntingnya cukup signifikan. Adapun key informan adalah koordinator kader gizi (Kalirungkut) dan Koordinator Surabaya Hebat putat dan beberapa masyarakat yang memiliki anak stunting.

Metode pengumpulan penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah, pedoman observasi, pedoman wawancara mendalam, dan pedoman dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan alur analisis menurut Miles dan Huberman, analisis dilakukan dengan tiga alur secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, 1984).

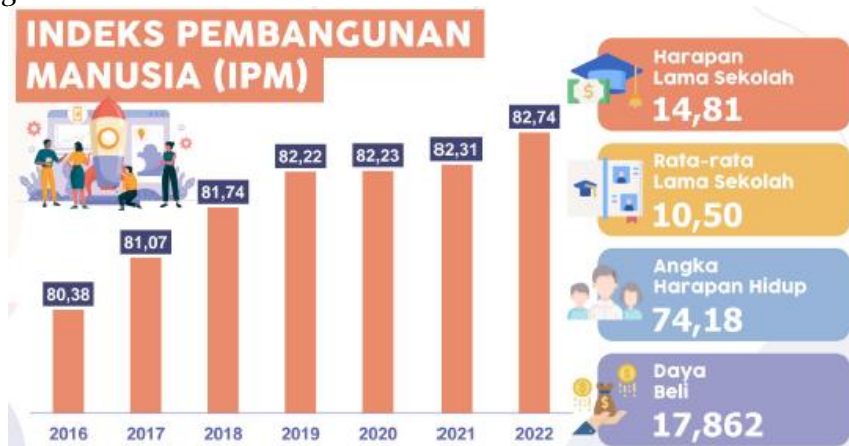
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Indeks Pembangunan Manusia dan Upaya Penurunan *Stunting* Di Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan ibukota Jawa Timur dan kawasan inti gerbangkertasusila. Kota Surabaya menjadi kota terbesar kedua di Indonesia serta merupakan kota metropolis yang dihuni berbagai etnis yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, yang sangat beragam. Terdapat 31 Kecamatan, 153 Kelurahan, 1.361 RW, dan 9.131 RT dengan luas wilayah 334,52 Km² di Kota Surabaya. Total populasi manusia di Kota Surabaya sebesar 2.970.730 (957.188 KK) dengan proporsi jumlah balita sebesar 208.175 (usia 0-4 tahun) dan proporsi jumlah anak-anak sebesar 675.238 (usia 5-18 tahun).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya secara agregat dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dicermati dari IPM pada lima tahun terakhir, dari tahun 2018 hingga 2022 angka agregatnya cukup signifikan, yakni pada 2018 di angka 81,74, naik 0,48 pada tahun 2019 menjadi 82,22, naik 0,01 pada 2020 menjadi 82,23 naik lagi 0,08 pada 2021 menjadi 82,31, dan pada 2022 naik 0,43 menjadi 82,74 (BPS Kota Surabaya, 2022). Adapun informasi grafisnya dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

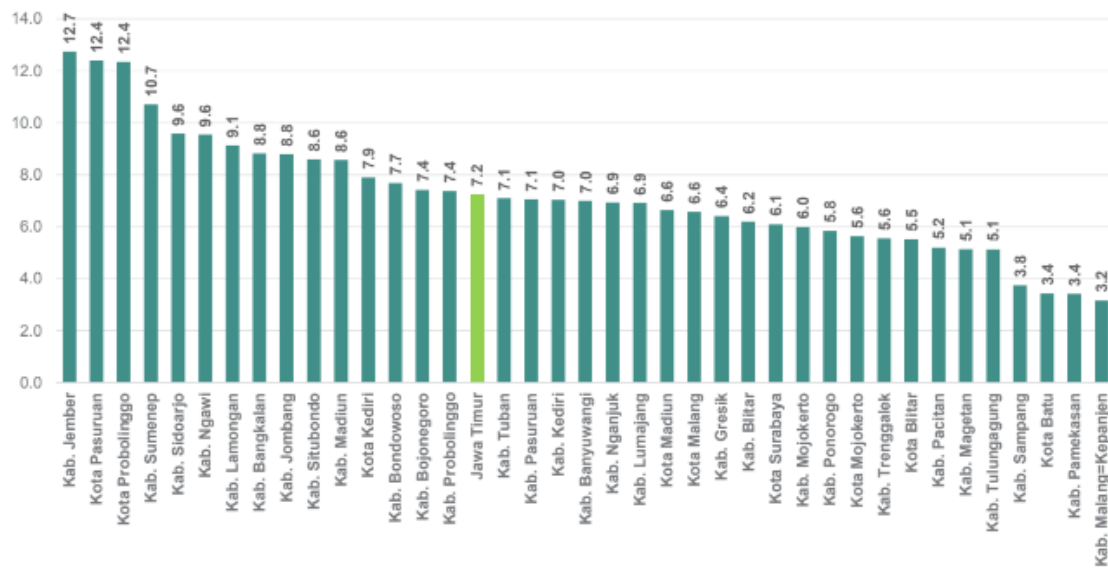


Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia Surabaya (BPS Kota Surabaya, 2022).

Kenaikan IPM Kota Surabaya tersebut di atas, tentunya menjadi momentum yang sangat baik, dalam upaya menurunkan *stunting* dan mencapai target prevalensi *stunting* diangka 14% pada tahun 2024. Penanganan *stunting* merupakan masalah yang strategis karena menyangkut eksistensi bangsa ke depan. *Stunting* atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang diakibatkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 HPK yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Capaian Prevalensi *stunting* di Kota Surabaya dari tahun 2019 hingga 2022 terus mengalami penurunan.

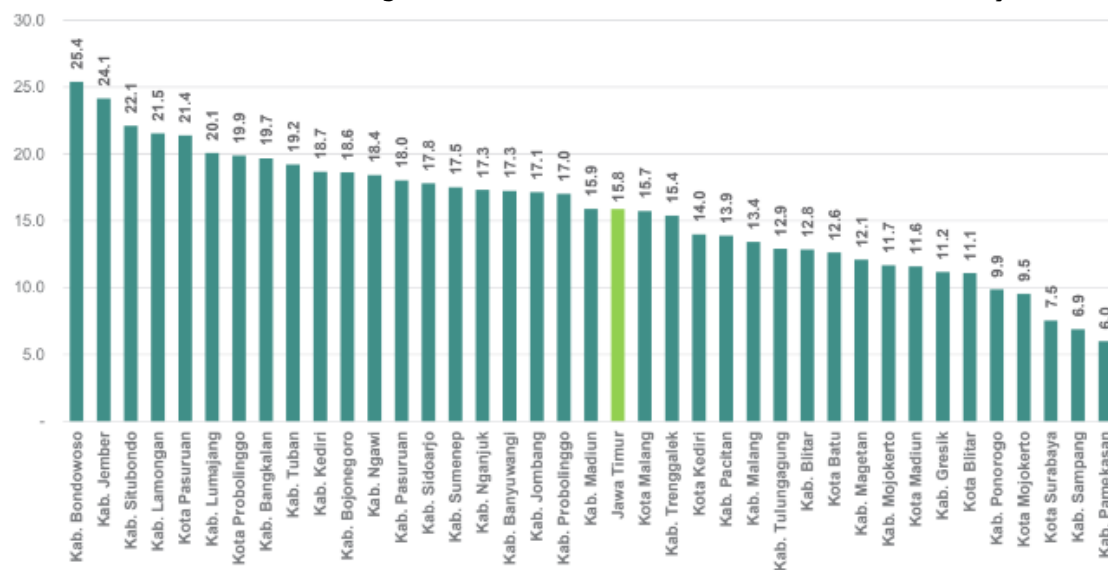
Walaupun belum sampai menyentuh target tahunan, namun tercatat menurun dari 8,54% pada 2019 menjadi 7,18% pada 2020. Kemudian menjadi 4,52% pada tahun 2021 dan 0,53% pada 2022 (Perdana, 2023). Gambaran prevalensi *stunting* di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel 1, 2 dan 3 berikut ini:

Tabel 1.
Prevalensi Balita *Stunting* (Berat Badan Menurut Tinggi Badan) Kota Surabaya 2022



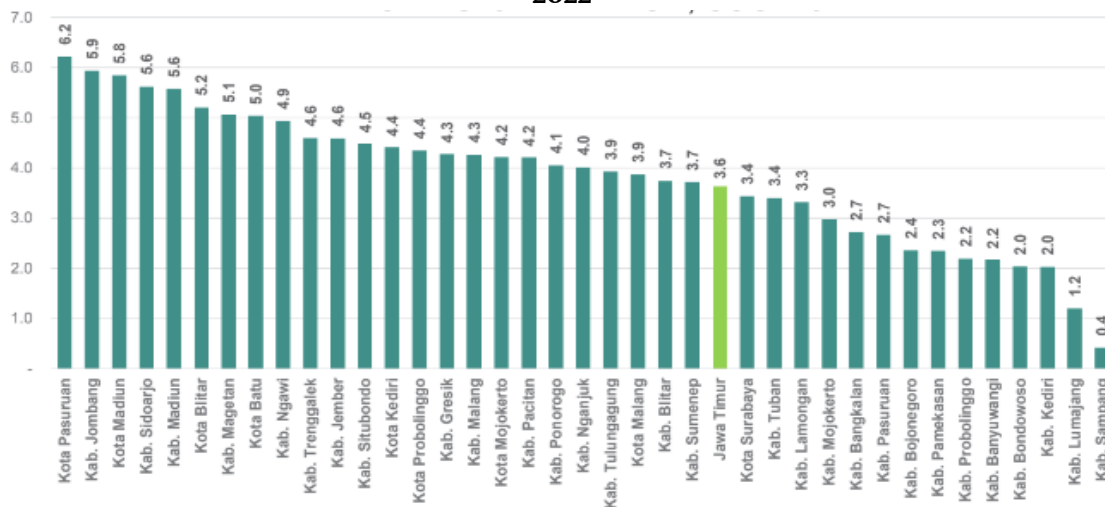
(Syarifah Liza Munira, 2022)

Tabel 2.
Prevalensi Balita *Stunting* (Berat Badan Menurut Umur) Kota Surabaya 2022



Sumber: (Syarifah Liza Munira, 2022)

Tabel 3.
Prevalensi Balita *Stunting* (Berat Badan Menurut Tinggi Badan) Kota Surabaya 2022



Sumber: (Syarifah Liza Munira, 2022)

Dengan demikian, prevalensi *stunting* di Kota Surabaya dikategori balita *stunting* berdasar berat badan menurut tinggi badan sebesar 6,1. Prevalensi balita *stunting* berdasar pada berat badan menurut umur sebesar 7,5. Prevalensi balita *stunting* berdasar pada berat badan menurut tinggi badan sebesar 3,4. Artinya ketiga kategori dalam prevalensi *stunting* di Kota Surabaya tersebut, masih dibawah agregat Jawa Timur.

Potret Survei Gizi Indonesia (SSGI) Di Kota Surabaya

Berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menyebutkan prevalensi *Stunting* sebesar 3,4 %. Angka ini masih jauh dari angka prevalensi yang ditargetkan dalam RPJMN 2020- 2024, yakni 14%. Kemudian, berdasarkan data dari hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 tren prevalensi *stunting* balita (berdasarkan berat badan menurut tinggi badan) di Kota Surabaya menunjukkan penurunan sebesar 3,4 %. Sedangkan tren prevalensi balita (berdasarkan berat badan menurut umur) sebesar 7,5%. Serta tren prevalensi *stunting* balita (berdasarkan berat badan menurut tinggi badan) sebesar 6,1% (Rokom, 2022). Kondisi prevalensi *stunting* ini berkorelasi dengan tingginya indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya, karena indeks pembangunan manusia menggambarkan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.



Gambar 2. Penurunan Prevalensi *Stunting* Kota Surabaya

Sumber: (BPS Kota Surabaya, 2022)

Disisi lainnya, berpijak pada hasil studi dari data penimbangan sertentak di Kota Surabaya tahun 2014-Oktober 2022, per oktober tahun 2022 terdapat penurunan angka *stunting* sebesar 0,53 % menjadi 1.055 balita yang mengalami *stunting* di Kota Surabaya. Data tersebut di atas, memberi makna bahwa walau adanya tren penurunan prevalensi *stunting* di Kota Surabaya yang cukup signifikan, namun untuk mengejar dan memenuhi target penurunan *stunting* di angka 14% pada tahun 2024 tentunya harus membutuhkan usaha yang lebih keras (Cindy Mutia Annur, 2023). Upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Kota Surabaya dalam penurunan *stunting* dengan melakukan delapan aksi integrasi tingkat Kelurahan. Adapun kedelapan aksi integrasi tersebut, yakni: (1) analisis situasi; (2) rencana kegiatan; (3) rebus *stunting*; (4) ketersediaan regulasi upaya penurunan *stunting*; (5) pembinaan kader pembangunan manusia (KPM); (6) sistem manajemen data; (7) pengukuran dan publikasi data *stunting*; (8) review kinerja tahunan (Perdana, 2023).

Pembahasan

Kebijakan Percepatan Stunting Berbasis Penanganan 1000 Hari Kehidupan dan Penanganan Sarana Air Bersih Kota Surabaya

Di Indonesia disebut dengan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). 1000 hari pertama terdiri dari masa selama 270 hari (9 bulan) dalam kandungan dan 730 hari (2 tahun pertama) pasca lahir. 1000 Hari pertama kehidupan merupakan periode emas tumbuh kembang anak, karena pada periode ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat yang mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Untuk itu diperlukan gizi seimbang karena kekurangan gizi pada usia ini tidak dapat diperbaiki dimasa kehidupan selanjutnya.

Merujuk pada teori klasik H. L. Bloom yang menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu: (1) faktor gaya hidup (*life style*); (2) faktor lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya); (3) faktor pelayanan kesehatan; dan (4) faktor genetik (keturunan). Keempat faktor determinan tersebut, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi status derajat kesehatan seseorang. Selanjutnya, kekurangan gizi pada 1000 HPK akan bersifat permanen dan akan sangat sulit untuk diperbaiki. Secara teoritis, penyebab utama *stunting* adalah faktor kekurangan gizi secara permanen dan terus menerus serta kondisi lingkungan yang tidak atau kurang mendukung.

Dalam konteks itu, persoalan *Stunting* yang terjadi di Kota Surabaya pun pada prinsipnya berada pada empat faktor tersebut di atas. Meliputi; gaya hidup yang tidak sehat, lingkungan yang tidak mendukung, pelayanan kesehatan yang tersumbat, dan faktor bawaan penyakit turunan ditambah dengan kekurangan gizi pada 1000 HPK. Kota Surabaya telah melakukan beberapa kegiatan intervensi spesifik, diantaranya; (1) pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri; (2) calon pengantin, ibu hamil; (3) Promosi ASI Eksklusif; (4) Promosi Makanan Pendamping-ASI; (5) Promosi makanan berfortifikasi termasuk garam beryodium; (6) Promosi dan kampanye Tablet Tambah Darah; (7) Suplemen gizi mikro (Taburia); (8) Suplemen gizi makro (PMT); (9) Promosi dan kampanye gizi seimbang; (10) Promosi perubahan perilaku; (11) pemberian obat cacung; (12) Tata Laksana Gizi Buruk (13) Suplementasi vitamin A (Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022, 2022).

Adapun intervensi Kota Surabaya dalam penanggulangan *Stunting* dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Jenis Intervensi Penanganan *Stunting*

Jenis Intervensi	Target Intervensi	Bentuk Intervensi
Jenis Intervensi Spesifik	Ibu Hamil	Suplementasi besi folat Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK

Jenis Intervensi	Target Intevensi	Bentuk Intervensi
		Penanggulangan kecacingan pada ibu hamil
	Kelompok 0-6 bulan	Promosi ASI Eksklusif
	Kelompok 7-23 Bulan	Promosi menyusui ASI Eksklusif
		Fortifikasi zat besi
		Pemberian makanan padat untuk bayi
Jenis Intervensi Sensitif	Masyarakat umum	Percepatan Penyediaan air bersih dan sanitasi
		Perbaikan ketahanan pangan dan gizi
		Optimalisasi Keluarga Berencana
		Jaminan Persalinan Dasar
		Fortifikasi Pangan
		Intervensi remaja perempuan
		Pendidikan gizi masyarakat

Sumber: (Tim Peneliti, 2023)

Kedua jenis intervensi diatas, pada hakikatnya telah dilaksanakan secara simultan oleh Kota Surabaya sehingga telah menciptakan kondisi ideal yang diharapkan. Perlu dipahami bahwa dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari persoalan gizi dalam jangka pendek berakibat pada terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Kemudian, dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua.

Alhasil, kesemuanya itu akan menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, produktifitas, dan daya saing bangsa (Pedoman Perencanaan Program Gerakan 1000 HPK, 2012). Bahkan, USAID mengungkapkan bahwa status gizi akan berpengaruh pada penularan kurang gizi dan kemiskinan pada generasi yang akan datang. Tak ayal, intervensi gizi pada 1000 HPK merupakan prioritas utama untuk kualitas hidup di masa yang akan datang.

Upaya Penanganan *Stunting* Di Bidang Pendidikan Kota Surabaya

Percepatan penurunan *stunting* di Kota Surabaya merupakan yang terbaik se-Jawa Timur dan se-Indonesia hal ini dibuktikan oleh tercapainya prevalensi *stunting* Kota Surabaya sebagai yang terendah Se-Indonesia. Dalam kurun waktu 2 tahun dari 2020 hingga 2022 tercatat 11.865 balita terlepas dari kategori *stunting*. Prevalensi Kota Surabaya hanya 4,8% termasuk yang paling rendah se-Indonesia. Berikut adalah data penurunan prevalensi *stunting* di Kota Surabaya dalam 3 tahun terakhir:

Tabel 5. Prevalensi *Stunting* Kota Surabaya Tahun 2020-2022



Sumber: (Syarifah Liza Munira, 2022)

Kondisi tersebut, tidak lepas dari usaha keras yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya melakukan percepatan penurunan *stunting*, melalui langkah-langkah strategis, yakni: (1) menganalisis calon pengantin; (2) adanya sekolah untuk calon pengantin; (3) menganalisa ibu hamil (jika ditemukan ibun hamil dengan resiko *Stunting*, maka segera diberikan susu ibu hamil); (4) menganalisa balita yang diberikan MPASI (Makanan Pendamping ASI) sebanyak 3x sehari untuk balita terindikasi *stunting*); (5) menganalisa anak-anak balita berisiko *stunting* atau terkategori *stunting* secara berkelanjutan; (6) laporan *via* aplikasi *Sayang Warga* (Narasumber, 2022). Lihat gambar detailnya sebagai berikut:



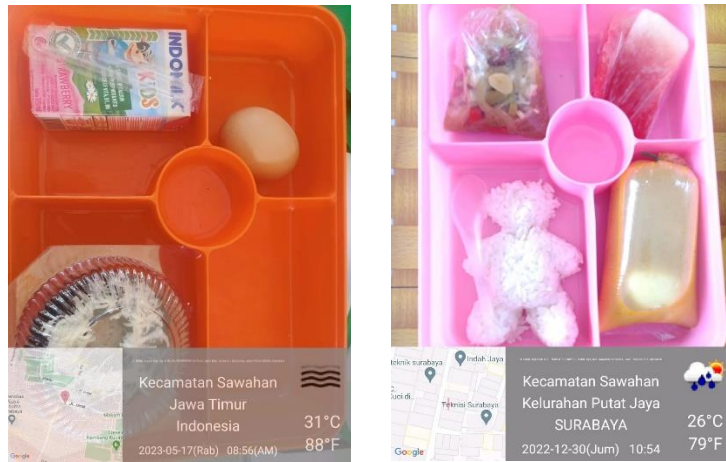
Gambar 3. Intervensi *Stunting* Kota Surabaya

Poin terpenting yang harus diingat, bahwa aplikasi “*sayang warga*” yang melibatkan para kader Kesehatan, RT/RW dan warga untuk dapat mendata dan melaporkan kondisi balita dan anak-anak disekitar tempat tinggal mereka menjadi media yang sangat efektif. Melalui aplikasi gotong royong inilah proses deteksi dini masyarakat terkait *stunting* dapat diselesaikan dengan cepat sehingga memangkas waktu proses penanganan (Narasumber, 2022). Sekadar contoh, pada tingkat RW terdapat dapur umum untuk wahana gotong royong warga masyarakat untuk saling membantu, memberikan makanan bagi balita di sekitar lokasi wilayahnya. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan bantuan makanan tambahan ke pelajar PAUD untuk menjaga tumbuh kembang mereka.

Upaya Penanganan *Stunting* Di Bidang Kesehatan Kota Surabaya

Hasil riset di lapangan menunjukkan bahwa di kelurahan Putat jaya 2023 tercatat 162 balita dengan kondisi *stunting*. Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 362 balita terindikasi *stunting* (Tim Jago Ceting, 2022). Sementara itu, di Kelurahan Kali Rungkut tercatat sebanyak 72 balita. Pada 2022 sebanyak 199 balita dengan indikasi *stunting*. Kedua kelurahan ini merupakan kelurahan yang ada di Kota Surabaya dengan angka penurunan *stunting* terbanyak.

Beberapa faktor penyebab terjadinya *stunting* di Kawasan Putat jaya dan Kali Rungkut adalah kondisi permukiman yang padat penduduk dengan status ekonomi warga rata-rata menengah ke bawah. Oleh karena itu, beberapa upaya intervensi dilakukan salah satunya dengan pemberian makanan tambahan. Berikut adalah contoh makanan tambahan yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya:



Gambar 4. Contoh Makanan tambahan yang diberikan kepada balita *Stunting*
 Sumber: (Sawahan, 2023)

Kader Kesehatan di Kelurahan Putat Jaya dan Kelurahan Kali Rungkut mendatangi rumah balita *stunting* dengan cara demo masak sehat dan murah. Upaya ini dilakukan mengingat banyak anak-anak balita dengan indikasi *stunting* tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup karena keterbatasan ekonomi dan pengetahuan orang tua.



Gambar 5. Anak *Stunting* Di Kelurahan Putat Jaya
 Sumber: (Tim Peneliti, 2023)



Gambar 6. Wawancara dengan Koordinator Kader Gizi Kali Rungkut (kiri) dan Kader Surabaya Hebat Putat Jaya (kanan)
 Sumber: (Tim Peneliti, 2023)

Tak heran, jika Brysson dalam konsepsi *stakeholder* menyebutkan bahwa *interest* adalah minat atau kepentingan stakeholder terhadap implementasi kebijakan, dalam penurunan *stunting*. BKKBN Pusat dikelompokkan sebagai *Player* yang menjadi pelaksana

kebijakan penanggulangan *stunting* di Jawa Timur. Bahkan, surat keputusan presiden menyebutkan bahwa BKKBN sebagai pelaksana utama dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*. Dan BKKBN Daerah merupakan kepanjangan tangan BKKBN Pusat di daerah.

Asosiasi perguruan tinggi juga dikelompokkan sebagai *player* merupakan pelaksana kebijakan penurunan *stunting*. Asosiasi perguruan tinggi sebagai organisasi yang memiliki kewenangan sebagai pelaksana dilapangan dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Sementara itu, satgas penurunan *stunting* termasuk kedalam *player* karena masuk kedalam tim pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan Surat Keputusan yang berlaku. Selain itu, Satgas percepatan *stunting* juga bertugas bertugas untuk membuat dapur umum di desa, menyediakan masakan dengan menu yang sudah ditentukan serta melakukan pendataan terkait data-data anak dengan resiko *stunting*. Asosiasi perguruan tinggi memiliki pengaruh yang tinggi serta memiliki kepentingan yang besar terkait percepatan penurunan *stunting*.

Sementara itu, Dinas Kesehatan merupakan stakeholder *subjek* yang memiliki kepentingan yang tinggi dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kota Surabaya, akan tetapi tidak memiliki kekuasaan yang tinggi karena seluruh kewenangan kebijakan berada pada BKKBN. Sama halnya dengan Dinas Pekerjaan umum dan cipta karya Kota Surabaya dikelompokkan menjadi *subject* karena memiliki kepentingan yang tidak terlalu penting dalam penanggulangan *stunting*. Hal tersebut selaras dengan OPD, Puskesmas dan Badan Pengendalian Penduduk dan KB yang juga memiliki kewenangan yang tidak begitu banyak.

Masyarakat dengan balita *stunting* dikelompokkan menjadi *stakeholder crowd* atau pendukung. Masyarakat ini yang kemudian akan mendapatkan penanganan dan bantuan untuk anak balitanya yang terkena *stunting* berupa tambahan susu, makanan olahan, dan obat-obatan serta pembuatan sanitasi yang bersih dan sehat. Selanjutnya, organisasi PKK, organisasi ini memiliki peran sebagai penggerak pembantu bagi ibu-ibu yang memiliki bayi agar mau memerikasakan bayi ke posyandu dengan rutin. Analisis *stakeholder* terkait percepatan penurunan *stunting* di Kota Surabaya dideskripsikan dalam Matriks di bawah ini:



Gambar 7. Analisis Stakeholder kebijakan penurunan *Stunting*

Sumber: (Tim Peneliti, 2023)

Stakeholder dengan kuadran *subject* dan *crowd* membutuhkan peran yang lebih dengan dorongan maksimum agar perannya dapat berubah menjadi *player* yang memiliki peran dan kepentingan yang tinggi. Adapun analisis peran dan identifikasi

stakeholder dalam penanganan penurunan *stunting* di Kota Surabaya dijelaskan dalam tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Matriks *Stakeholder Analisis Kebijakan Penurunan Stunting Kota Surabaya*

<i>Stakeholder</i>	Peran	Tingkatan <i>Stakeholder</i>		Deskripsi
		Tingkat Pengaruh	Tingkat Ketergantungan	
BKKN Pusat	1. Regulator ditingkat Nasional 2. Implementator dan Evaluator	Tinggi	Tinggi	BKKN Pusat merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan penurunan <i>stunting</i> ditingkat daerah.
BKKBN Daerah Kota Surabaya	1. Regulator ditingkat daerah 2. Implementator dan evaluator tingkat daerah	Tinggi	Tinggi	BKKBN Daerah merupakan kepanjangan dari BKKBN Pusat organisasi pemerintah ini memiliki kewenangan dalam tahapan pelaksanaan hingga evaluasi percepatan penanganan <i>stunting</i> di Kota Surabaya.
Asosiasi Perguruan Tinggi	Implementator dan Evaluator tingkat daerah	Tinggi	Tinggi	Asosiasi perguruan tinggi merupakan serikat peneliti diperguruan tinggi yang mendapatkan dana hibah dari Matchingfund kedaireka dan memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan <i>stunting</i> .
Satgas Percepatan Penurunan Stunting	Implementator dan Evaluator tingkat daerah	Tinggi	Tinggi	Satgas percepatan penurunan <i>stunting</i> dibentuk untuk pendampingan bagi masyarakat yang memiliki bayi dengan <i>stunting</i> . Satgas <i>stunting</i> dibentuk dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat desa/kelurahan.
Kader Kesehatan	1. Implementator 2. Fasilitator dalam kebijakan	Tinggi	Tinggi	Kader Kesehatan merupakan fasilitator yang bertugas untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat.

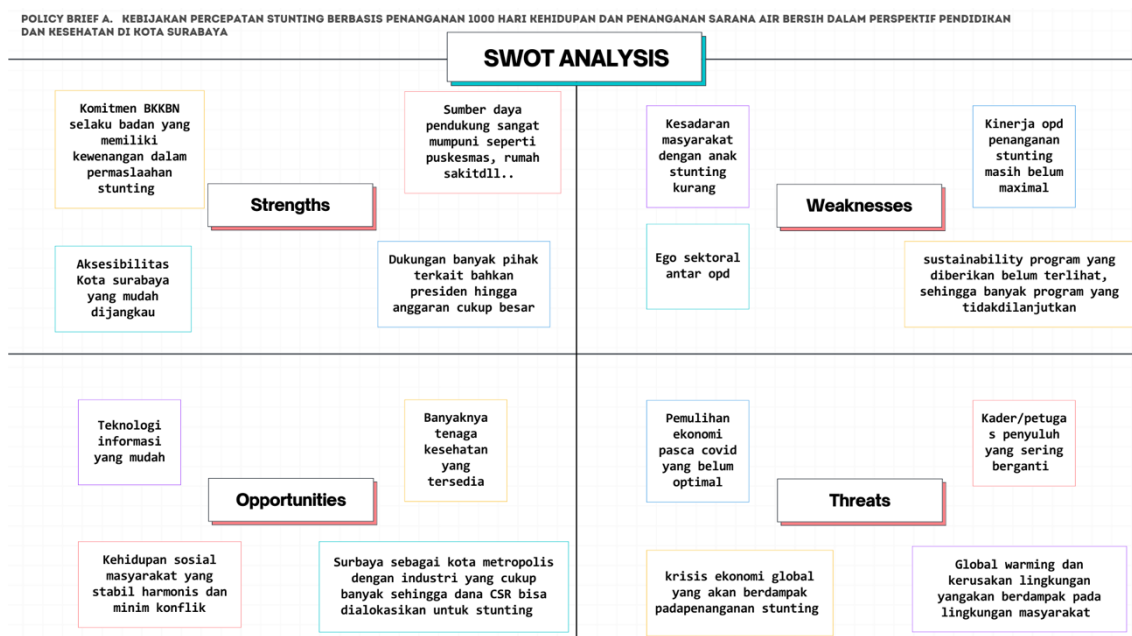
Stakeholder	Peran	Tingkatan Stakeholder		Deskripsi
		Tingkat Pengaruh	Tingkat Ketergantungan	
Dinas Kesehatan	1. Implementator or 2. Fasilitator dalam kebijakan	Tinggi	Rendah	Dinas Kesehatan kota Surabaya memiliki kewenangan untuk membantu memeriksa dna memberiknan obat jika diperlukan bagi anak-anak dengan <i>stunting</i> .
Dinas Pekerjaan Umum dan Ciptakarya	Fasilitator dalam kebijakan	Rendah	Rendah	Dinas PUPR memiliki kewenangan untuk membuat sanitasi dan lingkungan yang layak, karena kebanyakan anak dengan kondisi <i>stunting</i> berada pada kondisi lingkungan yang kurang memadai.
OPD Lainnya	Fasilitator dalam kebijakan	Rendah	Rendah	OPD lainnya yang berhubungan dengan penanganan <i>stunting</i> memiliki kewenangan dalam membantu agar program percepatan penurunan <i>stunting</i> dapat tergelenggara dengan baik.
Puskesmas	1. Implementator or 2. Fasilitator dalam kebijakan	Rendah	Rendah	Puskesmas dalam hal ini memiliki kewenangan untuk merawat
Badan Pengendalian Penduduk dan KB	Fasilitator dalam kebijakan	Rendah	Rendah	Badan pengendalian penduduk dan KB menjadi fasilitator dalam percepatan penanganan <i>stunting</i> karena tugas badan ini ialah dapat sosialisasi ke masyarakat.
Organisasi PKK	Fasilitator dalam kebijakan	Rendah	Rendah	Organisai PKK merupakan organisasi
Masyarakat dan Balita Stunting	Penerima manfaat kebijakan	Rendah	Tinggi	Masyarakat yang memiliki bayi <i>stunting</i> akan menerima penanganan dan bantuan dari stakeholder terkait agar percepatan penurunan <i>stunting</i> dapat segera terselesaikan.

Sumber: (Tim Peneliti, 2023)

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Percepatan *Stunting* Di Kota Surabaya

Stunting menimbulkan banyak masalah. Efek buruk jangka panjang, terutama dalam dua tahun pertama kehidupan anak. Hal tersebut, karena *stunting* dapat menyebabkan tingkat kecerdasan menurun, kesejahteraan memburuk di masa depan, dan mengurangi kualitas sumber daya manusia. Walaupun, hubungan antara nutrisi dan pertumbuhan linear masih diperdebatkan. Menurut data Riskesdas 2013, terdapat 37,2% anak di bawah usia 5 tahun yang *stunted*, tetapi sebagian besar anak *stunted* tersebut memiliki berat badan normal (Pulungan, 2021).

Secara teoritis, untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat kebijakan *stunting* di Kota Surabaya dilakukan analisis SWOT. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan percepatan penanggulangan *stunting*. Selanjutnya, poin-poin yang ada dikategorikan menjadi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Analisis ini mengelaborasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam kebijakan penurunan *stunting* di Jawa Timur. Analisis SWOT dideskripsikan dalam gambar 8 di bawah ini:



Gambar 8. SWOT Analisis Kebijakan Penurunan *Stunting* Kota Surabaya.

Sumber: (Tim Peneliti, 2023).

Dengan demikian, jelaslah bahwa kekuatan (*strengths*) kebijakan penanganan *stunting* di Kota Surabaya, meliputi: (1) komitmen BKKBN selaku badan yang memiliki kewenangan dalam pencegahan dan penanganan *stunting*; (2) aksesibilitas Kota Surabaya yang mudah terjangkau; (3) sumber daya pendukung sangat mumpuni seperti Puskesmas dan Rumah Sakit; (4) dukungan dari banyak pihak terkait bahkan Keputusan Presiden dan anggaran yang cukup. Peluang (*opportunities*) dari penanganan *stunting* di Kota Surabaya meliputi; (1) teknologi informasi yang baik dan berkualitas; (2) kehidupan sosial masyarakat yang stabil, harmonis, minim konflik; (3) banyaknya tenaga kesehatan yang tersedia dan siap dalam penanganan *stunting*; (4) Surabaya sebagai Kota Metropolitan dengan industrinyang cukup banyak, sehingga dana CSR dapat mudah diakses dan dialokasikan untuk *stunting* (Tim Peneliti, 2023).

Di sisi yang sama, penanganan *stunting* di Kota Surabaya memiliki kelemahan (*weaknesses*) sebagai berikut: (1) rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang memiliki

anak *stunting*; (2) ego sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD); (3) kurang maksimalnya kinerja OPD dalam penanganan *stunting*; (4) *sustainability* program yang diberikan belum terlihat sehingga banyak program yang tidak dilanjutkan. Kemudian, tantangan (*theats*) adalah; (1) penanganan pasca covid yang belum optimal; (2) krisis ekonomi yang akan berdampak pada penanganan *stunting*; (3) kader/ petugas penyuluh yang sering berganti; (4) *global warming* dan kerusakan lingkungan berdampak pada lingkungan masyarakat di akar rumput (Tim Peneliti, 2023).

Mencermati tabel SWOT di atas, jelaslah bahwa faktor kekuatan, kesempatan peluang lebih dominan daripada kelemahan dan tantangan yang ada, sehingga penanganan *stunting* di Kota Surabaya, khususnya di Kampung KB Kelurahan Pukat Jaya dan Kelurahan Kali Rungkut dapat berjalan secara masif dan optimal. Faktor kelemahan dapat ditutupi dengan intensitas komunikasi, koordinasi dan pendampingan dari pihak-pihak terkait. Dan ancaman yang ada diminimalisir dengan kerja tim, super tim yang kolaboratif dan sinergis, sehingga pelbagai ancaman dapat ditekan dengan baik, dan dijadikan peluang perbaikan. Hal ini selaras dengan beragam kebijakan dari Wali Kota Surabaya yang senantiasa mendukung secara taktis dalam percepatan penanganan *stunting* (Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022, 2022).

SIMPULAN

Kampung KB Putat Jaya dan Kampung KB Kali Rungkut merupakan contoh ideal Kampung KB yang tingkat penurunan *stunting*nya cukup signifikan di Kota Surabaya. Kampung KB Kelurahan Putat Jaya, jumlah *stunting* pada 2022 sebanyak 362, pada 2023 turun menjadi 162, atau turun 223%. Sementara itu, Kelurahan Kali Rungkut pada 2022 jumlah *stunting* sebanyak 199, pada 2023 turun menjadi 72, atau 276%. Kebijakan yang telah dilakukan kedua Kampung KB tersebut, diantaranya, (1) menganalisis calon pengantin; (2) adanya sekolah untuk calon pengantin; (3) menganalisa ibu hamil (jika ditemukan ibun hamil dengan resiko *stunting*, maka segera diberikan susu ibu hamil); (4) menganalisa balita yang diberikan MPASI (Makanan Pendamping ASI) sebanyak 3x sehari untuk balita terindikasi *stunting*; (5) menganalisa anak-anak balita berisiko *stunting* atau terkategori *stunting* secara berkelanjutan; (6) laporan *via* aplikasi *Sayang Warga*.

Adapun rekomendasinya adalah sebagai berikut: (1) kebijakan penanganan 1000 hari kehidupan harus berkelanjutan dan optimal; (2) penanganan intervensi *stunting* gizi sensitif dan spesifik harus terarah sesuai dengan rekomendasi audit *stunting*; (3) upaya penanganan *stunting* di bidang pendidikan dan kesehatan harus fokus pada kawasan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota Surabaya. Jadi, penurunan agregat angka secara kuantitatif di kedua Kampung KB tersebut di atas, menjadi *rool model* bagi Kampung KB lainnya, sekaligus bisa menjadi rujukan atau replikasi implementatif kebijakan bagi wilayah lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya disampaikan kepada Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Kabid Bidang BKKBN Jatim, beserta Jajarannya yang telah memfasilitasi, sekaligus mensponsori riset ini. Ucapan terimakasih, juga disampaikan kepada kolega pimpinan STKIP PGRI Pacitan, Kepala LPPM beserta jajarannya dan teman-teman sejawat dosen yang senantiasa mendukung kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Kota Surabaya. (2022). *Indek Pembangunan Manusia*.
Cindy Mutia Annur. (2023, February). Ini Rincian Angka Balita Stunting di Wilayah Jawa Timur pada 2022, Kabupaten Jember Terbesar. *Data Boks*, 1.

- Deti Rahmawati, Eddy Setiadi Soedjono, Soedarso, Nastasia Festy Margini, dan M. (2022). Pembuatan Protipe Sarana Air Bersih Sebagai Solusi Alternatif Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pacitan. *Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal)*, 1(2), 127-138. <https://doi.org/10.20473/mgi.v1i1SP.127-138>
- Dewey, K. G., & Begum, K. (2011). Long-term consequences of stunting in early life. *Maternal and Child Nutrition*, 7(SUPPL. 3), 5-18. <https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2011.00349.x>
- Miles, M. . & H. A. M. (1984). *Analisis Data Kualitatif* (Tjetjep Rohendi Rohidi (ed.); 1992nd ed.). Penerbit Universitas Indonesia.
- Mukodi, M. & D. R. (2022). Strategi Penanganan dan Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14(2), 1-15. <https://ejournal.stkippacitan.ac.id/ojs3/index.php/jpp/article/view/651/535>
- Mukodi, M. & D. R. (2023). *Strategi Penanganan dan Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Timur dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat* (1st ed.). LPPM STKIP PGRI Press. <https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/1015/>
- Narasumber. (2022). *Intervensi Kota Surabaya*.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, (2021).
- Perdana, D. (2023, May). *Jurus Eri Cahyadi Turunkan Kemiskinan di Surabaya. DetikJatim*, 1.
- Pulungan, A. (2021). Penuntasan Stunting pada Anak sebagai Masalah Multi-Faktorial: Medis, Sosial, Ekonomi, Politik, dan Emosional. *EJournal Kedokteran Indonesia*, 9(2), 76. <https://doi.org/10.23886/ejki.9.46.76>
- Rokom. (2022, January). Upaya Ibu Cegah Anak Stunting dan Obesitas. *Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id*, 1. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220118/2639172/upaya-ibu-cegah-anak-stunting-dan-obesitas/>
- Sawahan, K. K. K. (2023). *Contoh Makanan Tambahan untuk Balita Stunting*.
- Syarifah Liza Munira. (2022). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. https://ayosehat.kemkes.go.id/pub/files/files46531._MATERI_KABKPK_SOS_SSGI.pdf
- Tim Jago Ceting. (2022). *Laporan tim Jagongan Cegah Stunting (Jago Ceting)*.
- Tim Peneliti. (2023). *Anak Stunting Di Kelurahan Putat Jaya dan Kali Rungkut*.
- Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022, 1 (2022). https://pemerintahan.surabaya.go.id/apps/basis_data/storage/regulations/YeIxn27t4qcBsqTqdHRRxsSyJTCICSV692na4h9v.pdf